



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2023

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LUWU



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, SWT karena dengan Rahmat-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan hasil pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh ASN lingkup Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini, sehingga saran dan masukan sangat kami perlukan demi perbaikan diwaktu yang akan datang.

Belopa, 26 Februari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199703 1 034



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	7
1.6 Keuangan	8
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	22
2.3.1 Target Belanja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu	22
2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	22
2.4 Instrumen Pendukung	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022.....	37
3.3 Akuntabilitas Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	53



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menpan dan RB Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu tahun 2023 diharapkan :

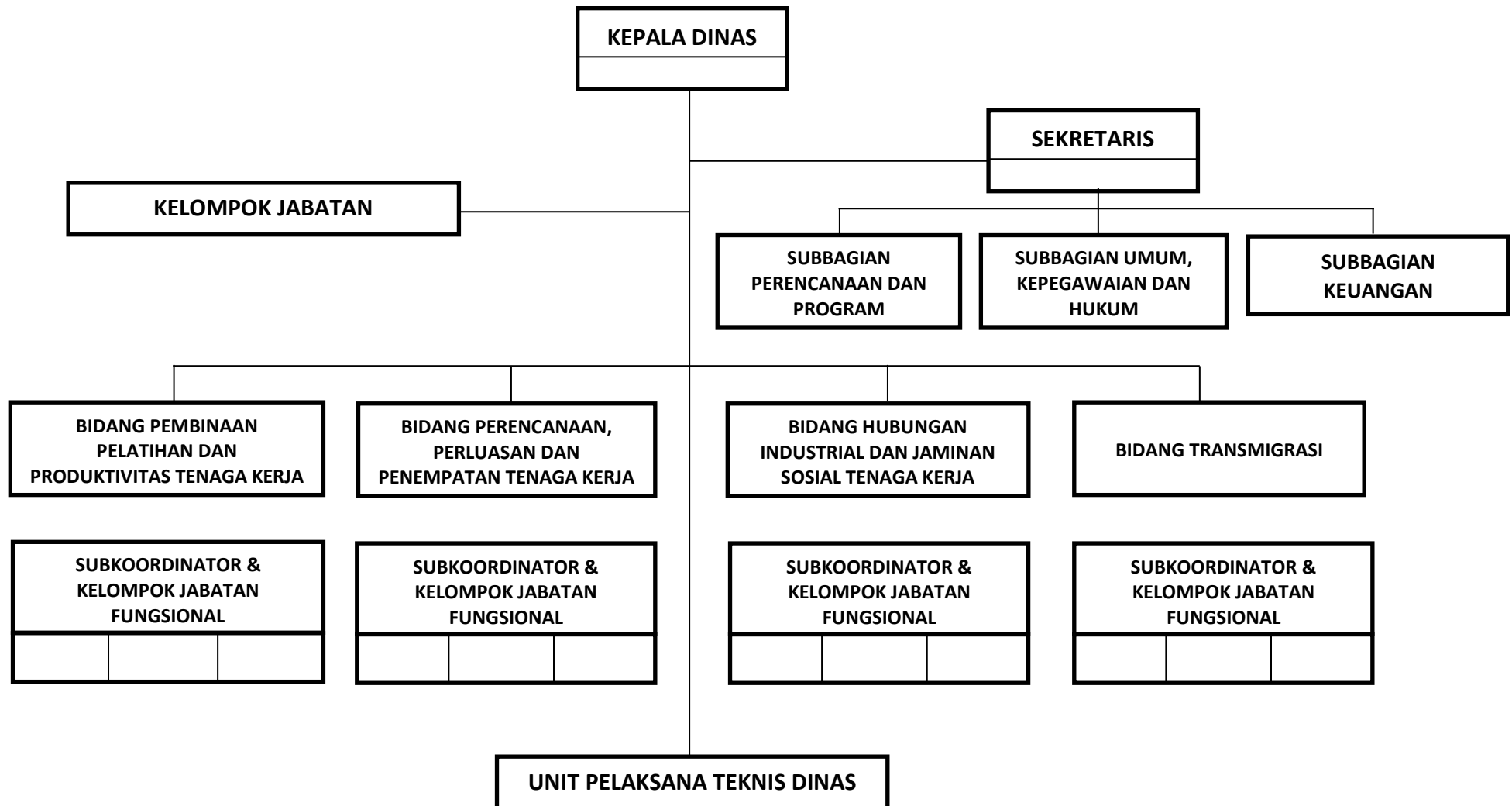
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
2. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya berkesinambungan bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Luwu





1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada tahun 2023, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka pengangguran yang berkaitan dengan pengentasan Kemiskinan ekstrim;
- b. Terbukanya investasi bagi perusahaan besar yang berpeluang mendatangkan tenaga kerja asing meningkatkan persaingan bagi tenaga kerja lokal dalam memperoleh lapangan kerja;
- c. Bonus demografi yang berdampak pada meningkatnya Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja membutuhkan perluasan kesempatan kerja;
- d. Tingginya angka keluaran SLTP, SLTA/SMK maupun Perguruan Tinggi menjadi angkatan kerja untuk siap menjadi tenaga kerja.



- e. Masih rendahnya sumberdaya manusia dan keterampilan lulusan Pendidikan untuk memasuki dunia kerja yang semakin melek teknologi digital.
- f. Belum adanya perhatian serius terkait Pekerja Migran Indonesia dalam hal perlindungan kerja.
- g. Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum berjalan maksimal.
- h. Hubungan Industrial yang masih belum kondusif sehingga memunculkan terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha;
- i. Pekerja disabilitas masih kurang mendapat peluang kerja di sektor formal;
- j. Masih kurangnya pemahaman masyarakat, pengusaha, dan pekerja terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan;
- k. Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat normatif;
- l. Berkurangnya wilayah/lokasi transmigrasi karena keterbatasan lahan khusus diperuntukan bagi transmigran;
- m. Munculnya konflik kepentingan dalam mempergunakan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan transmigrasi;
- n. Belum terkoordinasinya program pengembangan ketransmigrasian sehingga belum dapat dicapai sinkronisasi antara daerah dengan pusat.

1.4 Keadaan Pegawai

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal sebagaimana diuraikan di bawah ini

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sebanyak 69 orang, terdiri dari 48 orang PNS dan 21 orang Pegawai Non PNS.

Tabel 1.1
Komposisi keadaan Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Menurut Pangkat/Gol. Ruang

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/a	-	-	-
II/b	2	-	2
II/c	3	-	3



II/d	1	1	2
III/a	6	4	10
III/b	2	1	3
III/c	2	7	9
III/d	6	9	15
IV/a	-	3	3
IV/b	-	-	-
IV/c	1	-	1
Tenaga Kontrak	6	15	21
Jumlah	29	40	69

Sumber : Subbagian Kepegawaian Tahun 2023

Dalam memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu didukung oleh kekuatan sumber daya manusia PNS terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (Lima) orang Pejabat Eselon III, dan 4 (empat) orang Pejabat Eselon IV, 9 (sembilan) orang pejabat fungsional penyetaraan jabatan (Pengantar Kerja dan Mediator), 14 (dua belas) orang fungsional instruktur, 1 (satu) orang pengantar kerja dan 14 (lima belas) orang fungsional umum.

Selain ASN yang telah disebutkan di atas, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu dalam melaksanakan fungsinya juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 21 (tiga puluh satu) orang terdiri dari laki-laki 7 (tujuh) orang dan perempuan 14 (empat belas) orang. Masing-masing adalah Caraka 2 (tiga) orang, Kebersihan 2 (dua) orang, Tenaga administrasi 6 (lima belas) orang, Arsiparis 2 (dua) orang, Operator 6 (enam) orang, Operator SIMDA 1 (satu) orang dan petugas jaga malam 2 (dua) orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, sumberdaya aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu 2023 memiliki tingkat pendidikan yang cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3 dan SMA. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 1.2
Komposisi PNS Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2023

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total	Prosentase
	Laki-Laki	Perempuan		
SMA/Sederajat	6	1	7	14,58
D III	2	2	4	8,33
S1	17	14	31	64,59
S2	2	4	6	12,50
Jumlah	27	21	48	100

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 31 orang (64,59%), menyusul SMA/Sederajat berjumlah 7 orang (14,56%), S2 berjumlah 6 orang (12,50%) dan Diploma III berjumlah 4 orang (8,33%). Tingkat pendidikan ini belum menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dengan adanya Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 tahun 2016 yang diubah pada Peraturan Bupati Luwu Nomor 120 Tahun 2021 Kedudukan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu menyebabkan adanya perubahan komposisi jabatan yang dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Komposisi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun
2023

No	Jabatan	Jumlah Eselon			Ket
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1.	Eselon II	1	1	-	Memenuhi
2.	Eselon III.a	1	1	-	Memenuhi
3.	Eselon III.b	4	4	-	Memenuhi
4.	Eselon IV.a	4	4	-	Memenuhi
5.	Fungsional Penyetaraan	12	9	3	Memenuhi
6.	Fungsional Khusus	21	15	8	Belum Memenuhi
7.	Fungsional Umum	18	14	2	Belum Memenuhi
Jumlah		61	48	13	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2023



1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Aset yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sejak tahun 2017 Sampai 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar sarana dan Prasarana OPD

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Keterse diaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Bangunan dan Gedung						
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	1	0	0	100,00
Bangunan Workshop Pelatihan Kerja	6	Unit	2	1	0	50,00
Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga						
AC Split	10	Unit	7	0	0	70,00
Brankas	1	Unit	1	0	1	100,00
Camera Elektronik	2	Unit	1	0	1	50,00
Computer Dekstop (PC)	20	Unit	9	0	0	45,00
Computer Laptop	10	Unit	4	0	4	40,00
Dispenser	2	Unit	0	0	0	-
Filling besi/metal	5	Unit	1	0	0	20,00
Gorden	20	Unit	2	0	0	10,00
Kursi Kerja	30	Buah	30	0	0	100,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	1	0	0	100,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	2	0	0	40,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	4	0	0	100,00
Kursi Rapat Pejabat	8	Buah	2	0	0	25,00
Kursi Tamu	3	Buah	1	0	0	33,33
Kursi Tunggu	4	Buah	0	0	0	-
Lemari Es	3	Unit	2	0	0	66,67
Lemari Arsip Kayu	7	Buah	4	0	0	57,14
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	1	0	0	100,00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	2	0	0	40,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	4	0	0	100,00
Meja Kerja Pelayanan	5	Buah	3	0	0	60,00



Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Mesin Absensi Fingerprint	2	Buah	2	0	0	100,00
Mesin Pompa Air	1	Unit	1	0	0	100,00
Televisi	3	Unit	3	0	0	100,00
UPS/Internet Wifi	2	Unit	2	0	0	100,00
Kendaraan Bermotor						
Kendaraan Roda 2	10	Unit	7	0	0	70,00
Kendaraan Roda 4	3	Unit	2	0	1	66,67
Peralatan Studio						
Wireless	2	Unit	2	0	0	100,00
Infocus	2	Unit	2	0	0	100,00
Peralatan Mesin dan Pertukangan (Pelatihan Kerja)						
Mesin Ketam	16	Unit	4	0	0	25,00
Mesin Las	16	Unit	4	0	0	25,00
Mesin Ketam Listrik(modem/M2900)	1	Unit	1	0	0	100,00
Mesin Bor Wifro/MK 361 A	16	Unit	2	0	0	12,50
Mesin Bor tangan	16	Unit	2	0	0	12,50
Mesin Gergaji	5	Unit	2	1	0	60,00
Boneka Manekin	16	Unit	10	0	0	62,50
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						65,93

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan rata-rata ketersediaan sarana dan prasarana 65,93. Jika dilihat pada rincian, kondisi sarana/Gedung pelatihan kerja masih 50%. Hal ini disebabkan kondisi sarana bangunan pelatihan kerja saat relokasi Balai Latihan Kerja dari Kota Palopo Ke Kec. Bua, Kab. Luwu, masih minim dari kebutuhan.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Luwu. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.534.813.215,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp.4.540.533.405,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.318.763.319,- dan belanja Modal sebesar Rp.1.675.516.491,-,



Anggaran tersebut untuk mendanai 5 program, 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

Tabel 1.5
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persen	100	5.552.689.910	100	5.211.357.297
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	11.920.170	100	5.920.170
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	2	9.361.770	2	3.361.770
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	429.000	1	429.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	429.000	1	429.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	468.000	1	468.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	468.000	1	468.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Dokumen	1	764.400	1	764.400
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	4.948.631.000	100	4.534.533.405
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	orang/ bulan	660	4.859.831.000	660	4.445.733.405



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	Dokumen	84	88.800.000	84	88.800.000
		Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	Persen	100	6.460.200	100	6.460.200
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	6.460.200	1	6.460.200
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100	254.230.250	100	326.844.250
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	8	3.080.900	8	3.080.900
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	-	1	2.500.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	7	3.602.250	7	3.602.250
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	5	9.370.000	5	9.370.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jenis	5	8.400.000	5	6.400.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	Jenis	5	31.231.100	5	31.231.100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan jamuan makan dan minum yang disediakan	Bulan	12	9.010.000	12	9.010.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kali	68	189.536.000	68	261.650.000
			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi SKPD	Kali	12		12	



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	Persen	100	267.000.300	100	263.100.300
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	Surat	60	26.400.000	60	24.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Bulan	12	72.000.300	12	72.000.300
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	2	5.400.000	2	3.900.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	orang/ bulan	276	163.200.000	276	163.200.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan Daerah	Persen	100	64.447.990	100	74.498.972
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	15	59.448.268	15	69.499.250
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	Unit	15		15	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	m2	1	4.999.722	2	4.999.722
2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan jenis pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan	Persen	90	1.938.243.872	90	1.732.747.833
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	Persen	60	1.922.574.072	60	1.717.078.033



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Orang	16	122.574.000	16	79.355.650
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelatihan kerja Kab/Kota yang diadakan	Unit	5	1.800.000.072	5	1.637.722.383
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	LPK	4	15.669.800	4	15.669.800
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	LPK	4	15.669.800	4	15.669.800
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	6,06	46.499.800	6,06	50.194.400
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	pelayanan	1	38.827.800	1	42.522.400
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah bulan pelayanan antar kerja	Bulan	12	23.691.500	12	27.386.100
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan	Orang	20	15.136.300	20	15.136.300
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	Persen	40	7.672.000	40	7.672.000
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlibat	Orang	2	7.672.000	2	7.672.000
4	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal	Hubungan Industrial	persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	Persen	95	337.096.580	95	505.219.577



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	100	21.790.920	100	22.631.820
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Dokumen	1	21.790.920	1	22.631.820
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	persen	90	315.305.660		482.587.757
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Kali	4	15.239.660	4	16.866.460
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	Orang	10500	300.066.000		465.721.297
5	Meningkatnya Perekonomian Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Ha	12	35.294.108	12	35.294.108
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Lokasi	1	35.294.108	1	35.294.108



NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
					Target	Rp	Target	Rp
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang disiapkan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Paket	1	35.294.108	1	35.294.108
TOTAL ANGGARAN						7.909.824.270		7.534.813.215

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan LKljp Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2023 meliputi :

Bab I Pendahuluan

Merupakan uraian pendahuluan yang memuat struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu-isu strategis, Kadaan Pegawai, Kadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Merupakan uraian Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang memuat Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran dan Instrumen Pendukung.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan uraian Akuntabilitas Kinerja yang memuat Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya dan Akuntabilitas Anggaran

Bab VIII Penutup

Merupakan uraian penutup yang memuat kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan dan strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kab. Luwu Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 8 Tahun 2019 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Tahun 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Nomor KEP.018/NAKER/I/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kab. Luwu Tahun 2019-2024.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Luwu yang hendak dicapai pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**“KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI,
DALAM NUANSAL RELIGI”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :



1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius.
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
9. Menegakkan supreme hukum, hak azazi manusia untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengemban tugas sejalan dengan Misi ke-4 yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah pada periode tertentu. Tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dirumuskan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah mengalami Perubahan pada tahun sebelumnya (Perda No. 3 Tahun 2021). Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu adalah sebagai berikut :



1 Tujuan Pembangunan Jangka Menengah OPD

Adapun tujuan pembangunan Jangka Menengah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif;
2. Menurunkan Angka Pengangguran;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

2 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah OPD

Adapun sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kesempatan kerja;
3. Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal;
4. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
5. Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	64,22% (CC)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	72,02% (BB)
2	Menurunkan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,72%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
		Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	63,44%
		Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industry	73,81%
		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	34,56%
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi		Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang	100%
		Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	1 Kawasan

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah juga didukung oleh pencapaian sejumlah indikator teknis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada visi dan misi RPJMD maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, melaksanakan kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu TA 2019–2024 sebagai berikut :

A Bidang Ketenagakerjaan

- a Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja
- b Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja



- c Pembinaan hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
- d Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

B Bidang Transmigrasi

Program pemukiman dan lingkungan ditujukan untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT yang ada serta penyelesaian UPT bermasalah yang diakibatkan oleh faktor fisik lingkungan. Pembangunan permukiman transmigrasi baru diarahkan pada terwujudnya kondisi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat merupakan basis dan titik tolak pengembangan pertanian dan perekonomian unit permukiman transmigrasi sampai kepada tingkat perkembangan tertentu. Pengembangan permukiman yang status pertanahannya sudah jelas serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana Penyelesaian penanganan UPT bermasalah sebagai prioritas pembinaan UPT.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan target kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

VISI : Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi			
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Professional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kapabilitas perangkat daerah	Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia
VISI : Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi			
MISI 4 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, melalui Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja			



Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Pengembangan rencana tenaga kerja
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja formal dipasar kerja	Peningkatan pelayanan dan informasi ketenagakerjaan
			Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak disektor formal dan perlindungan tenaga kerja disektor informal
		Pemberdayaan usaha mandiri dan padat karya untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja disektor informal yang produktif
		Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, dan program keselamatan dan kesehatan kerja	Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, bernartabat dan berkeadilan
	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas tenaga kerja
			Peningkatan produktivitas tenaga kerja guna mencetak tenaga kerja dan wirausaha kreatif yang berdaya saing
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Peningkatan pemukiman transmigrasi dan pembinaan transmigrasi	pemenuhan sarana prasarana dasar di pemukiman transmigrasi serta pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	-	72,02% (B)	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
2.	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	Persen	63,44%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
3.	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri	Persen	73,81%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
4.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	Persen	34,56%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %
5.	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	Kawasan	1	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25 % 50 % 75 % 100 %



2.3 Rencana Anggaran 2023

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.534.813.215,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp. 4,540.533.405,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.318.763.319,- dan belanja Modal sebesar Rp.1.675.516.491,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja tersebut bersumber dari APBD yang terdiri atas 5 program, 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

2.3.1 Target Belanja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu
Adapun target Belanja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Belanja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu

No.	Uraian	Target	Persentase
1.	Belanja Pegawai	4.540.533.405	60,26
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.318.763.319	17,50
3.	Belanja Modal	1.675.516.491	22,24
	Jumlah	7.534.813.215	100,00

2.3.2` Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2023 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.920.170	Didukung 1 program, 6 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.534.533.405	



No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket.
			Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	6.460.200	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.844.250	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.100.300	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.498.972	
2.	Meningkatnya kesempatan kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	42.522.400	Didukung 1 program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	6.672.000	
3	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	22.631.820	Di dukung 1 program dan 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	482.587.757	



No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket.
			Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten		
4.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.717.078.033	Di dukung 1 program dan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.669.800	
5.	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	35.294.108	Di dukung 1 program dan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu yang mendukung pelaksanaan SAKIP di OPD antara lain adanya Media Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang berisi informasi yang terkait kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu antara lain info pelatihan kerja, info lowongan kerja dan informasi lain terkait Disnakertrans yang perlu diketahui masyarakat umum.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian optimal indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada tahun penilaian. Capaian ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah melaksanakan peningkatan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana target yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang terjadi antara target dan capaian menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan melakukan perubahan ataupun inovasi yang memungkinkan bagi perbaikan kinerja perangkat daerah.

Secara makro, pada tahun 2023 tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan mencapai target dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,85% pada tahun 2022 menurun pada angka 3,70% pada tahun 2023. Kondisi ini secara sektoral turut dipengaruhi dengan adanya pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu :

a. Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama perangkat daerah ditujukan untuk mengukur kinerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Berikut target dan capaian/realisasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu tahun 2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, dirinci pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA	KET
				TARGET	REALISASI		
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	75,02	72,02	n.a	n.a	Masih dalam proses dinilai
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	70,13	63,44	72,53	114,33	
3	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri	72,39	73,81	50,46	68,36	
4	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	32,87	34,56	22,92	66,32	
5	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	1	1	1	100.00	

Pada tabel dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian predikat penilaian implementasi SAKIP belum terdapat realisasi disebabkan proses penilaiannya masih sementara dilakukan oleh Tim Inspektorat. Meskipun demikian jika dicermati pada tahun sebelumnya (tahun 2022) nilai SAKIP yang diperoleh telah melebihi target pada tahun 2023 sebagaimana yang ditargetkan dalam Renstra perangkat daerah. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur kelengkapan dan kualitas dokumen SAKIP perangkat daerah.
2. Capaian persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja pada tahun 2023 mencapai nilai 72,53%. Seperti tahun sebelumnya (tahun 2022), tahun 2023 juga menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan melebihi target yang direncanakan (target Renstra

perangkat daerah). Pencapaian ini diukur dari jumlah Angkatan kerja yang telah menempati lowongan kerja tahun 2023 berjumlah 188.441 jiwa (*data BPS, Luwu dalam Angka 2024*) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berjumlah 259.800 jiwa (*data BPS, Luwu dalam Angka 2024*).

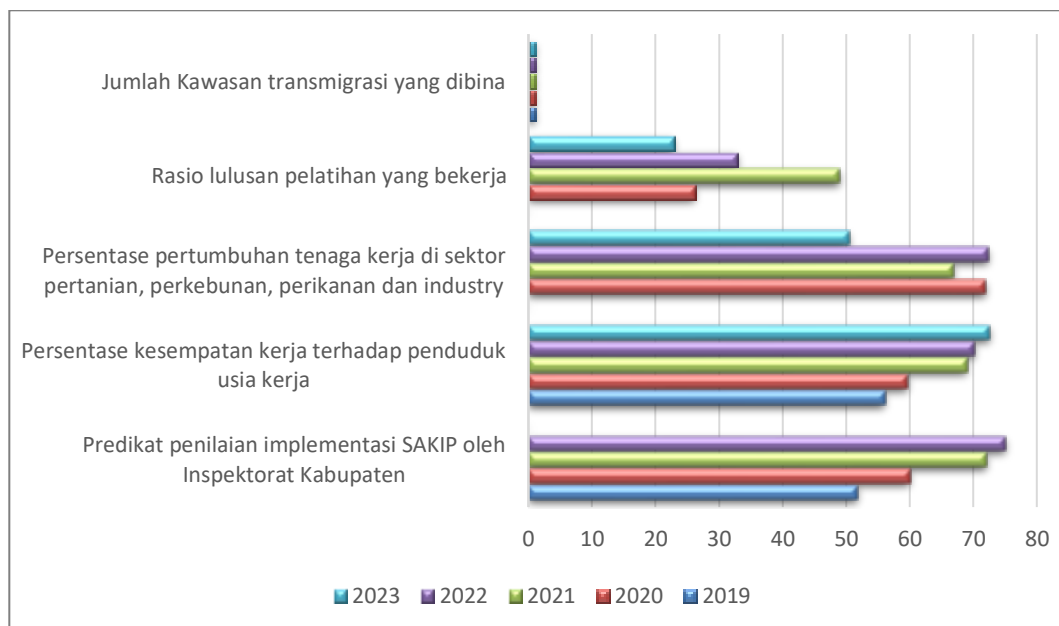
3. Capaian persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri di Kabupaten Luwu masih menempati tingkat tertinggi pada angka 50,46% menurun 23,35% dari tahun sebelumnya (*Diolah dari Data BPS Tahun 2024*). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran sektor lapangan kerja dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri ke sektor lainnya. Meskipun demikian, sektor ini masih menyerap tenaga kerja lebih besar sebab mengingat sektor ini bersen alternatif peluang kerja bagi tenaga kerja di berbagai daerah termasuk Kabupaten Luwu.
4. Capaian rasio lulusan pelatihan yang bekerja menunjukkan capaian yang menurun pada angka 22,92% atau hanya 66,32% dari target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami penurunan 11,64% dari tahun sebelumnya (2022). Capaian ini diukur dari jumlah tenaga kerja yang dilatih tahun 2023 adalah 192 orang yang hanya terserap bekerja sebanyak 44 orang. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tuntutan dunia kerja untuk kompetensi tertentu lebih dibutuhkan dibandingkan pelatihan kompetensi yang tersedia. Salah satu diantaranya Pelatihan alat berat yang banyak dibutuhkan dengan terbukanya beberapa perusahaan industri besar di Kabupaten Luwu. Faktor lainnya yang juga menyebabkan hal tersebut adalah kemampuan membuka usaha atau lapangan berusaha secara mandiri masih rendah.
5. Capaian jumlah kawasan transmigrasi yg dibina tercapai 100% dengan dilaksanakannya penguatan infrastruktur wilayah Kawasan transmigrasi di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua Kab. Luwu. Tahun sebelumnya juga tercapai 100% yang berlokasi di Desa Bolu, Kecamatan Basse Sangtempe (Bastem) Kab. Luwu.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra Tahun 2019-2024 dapat digambarkan perkembangan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023
1	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	51,78	60,04	72,1	75,02	n.a
2	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	56,07	59,74	69	70,13	72,53
3	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industry	n.a	71,94	66,89	72,39	50,46
4	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	n.a	26,2	48,98	32,87	22,92
5	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	1	1	1	1	1

Gambar 3.1
Grafik Capaian Kinerja berdasarkan IKU Tahun 2019 - 2023



Berdasarkan tabel dan grafik perkembangan capaian kinerja berdasarkan IKU tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami kemajuan setiap tahunnya yakni Nilai SAKIP dan persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Peningkatan pada nilai SAKIP menunjukkan adanya peningkatan kualitas dokumen. Dan peningkatan pada indikator kesempatan kerja terhadap penduduk usia



kerja menunjukkan pencapaian di bidang ketenagakerjaan yang menunjukkan meningkatnya angka tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 di angka 3,70% berkurang 0,15% dari tahun 2022 yang berada di angka 3,85% (Data BPS, Tahun 2023, 2024).

Selanjutnya, dari tabel dan grafik tersebut terlihat 2 (dua) indikator lainnya yang berkembang secara fluktuatif yakni Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri serta rasio lulusan Pelatihan yang bekerja. Umumnya Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri didominasi oleh sektor informal sehingga pekerja pada sektor ini relatif tidak terikat. Sedangkan pada indikator rasio lulusan pelatihan yang bekerja bergerak fluktuatif karena dipengaruhi oleh kapasitas pelatihan yang disediakan serta ketersediaan lapangan kerja atau usaha.

Selain itu, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mengalami perkembangan yakni jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina. Hal ini disebabkan belum adanya rencana Kawasan transmigrasi yang jelas untuk dikembangkan sebagai pemukiman transmigrasi yang mandiri.

b. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja juga ditopang dengan Indikator kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan urusan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		%
			Target	Capaian	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	56,52	46,67	43,48	93,17



No	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		%
			Target	Capaian	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	58,33	65,00	28,65	44,08
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp.Juta/pekerja)	62,75	110,32	61,92	56,13
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (%)	4,71	7,07	1,45	20,51
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	22,97	46,90	24,31	51,47
6	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	1	1	100
7	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	1	1	100
8	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	1	1	100

Berdasarkan tabel capaian indikator di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar indikator mengalami penurunan yang cukup rendah yang menunjukkan adanya kinerja yang tidak terpenuhi di bidang ketenagakerjaan. Capaian-capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan realisasi pada angka 43,48%. Jumlah Sub Kegiatan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan adalah 10 Sub kegiatan dari 23 Sub kegiatan bidang



- ketenagakerjaan yang direncanakan dalam Renstra dan RTKD yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tidak memenuhi target target yang ditetapkan yakni hanya terealisasi 28,65% atau hanya mencapai 44,08%. Tenaga kerja yang lulus kompetensi sejumlah 55 orang dari 192 orang yang dilatih melalui Balai Latihan Kerja Kab. Luwu.
 3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 61,92%. Jumlah ini diperoleh dari PDRB berdasarkan harga konstan Tahun 2023 yakni 11,67 Triliun Rupiah terhadap jumlah orang yang bekerja tahun 2023 sejumlah 188.441 jiwa.
 4. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja mengalami penurunan yang sangat drastis dengan realisasi 1,45% atau 95 orang dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 6532 orang atau 20,51%.
 5. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 24,31% atau 51,47% dari target yang ditetapkan. Jumlah perusahaan dengan tata Kelola yang layak adalah 106 perusahaan dari 436 perusahaan (besar, menengah dan kecil) di wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 2023.
 6. Pada 3 (tiga) indikator terakhir terkait bidang transmigrasi, capaian yang diperoleh hanya pada 2 (dua) indikator jumlah Kawasan yang difasilitasi penmbangunannya dan jumlah kawasan yang dibina adalah 1 (satu) kawasan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kab. Luwu.

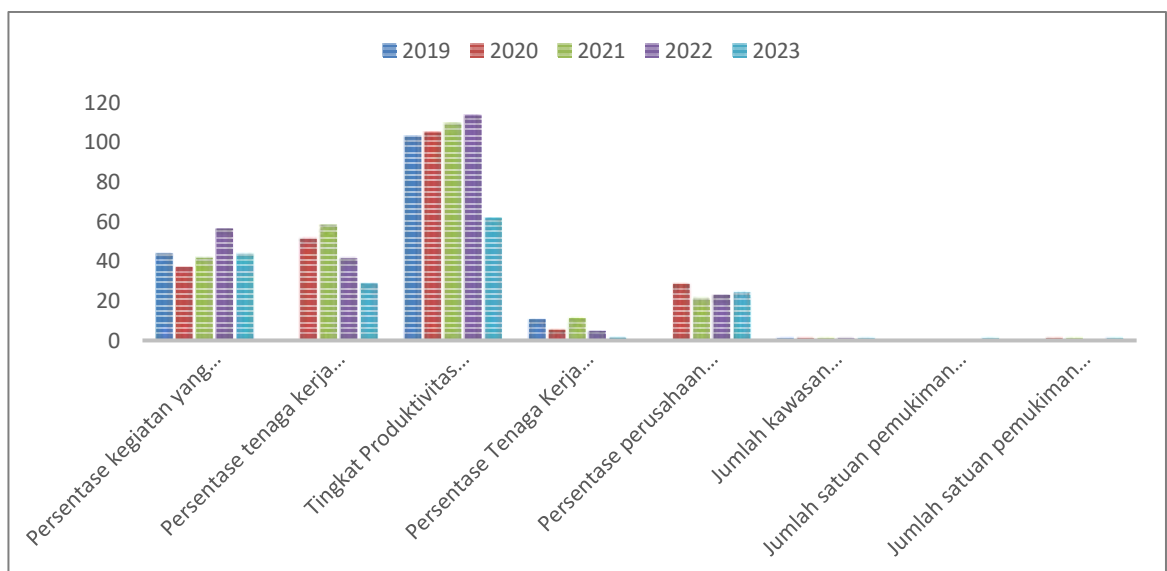
Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya, maka perkembangan capaian indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Kunci	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	43,75	37,04	41,67	56,52	43,48

No	Indikator Kinerja Kunci	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	n.a	51,38	58,33	41,29	28,65
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp.Juta/pekerja)	63,93	64,73	64,41	62,75	61,92
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (%)	17,08	5,45	11,36	4,71	1,45
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	n.a	28,6	21,32	22,97	24,14
6	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1	1	1	1	1
7	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	0	0	0	1
8	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	1	1	0	1

Gambar 3.2
Grafik Capaian Kinerja berdasarkan IKK



Pada tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa umumnya capaian indikator kinerja sangat fluktuatif, kecuali capaian indikator tingkat produktivitas dengan capaian relative sama dan capaian indikator bidang ketransmigrasian yang stagnan atau relatif tidak berkembang. Beberapa faktor yang

mempengaruhi perkembangan capaian indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja dipengaruhi oleh isu ketenagakerjaan yang berkembang di daerah dan kondisi penganggaran. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan kegiatan yang diakomodir berubah setiap tahunnya.
- b) Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dipengaruhi oleh jenis pelatihan yang disediakan. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi menurun di tahun-tahun awal karena pelatihan berbasis kewirausahaan/masyarakat lebih banyak dilaksanakan yang relatif tidak membutuhkan kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan. Pelatihan-pelatihan tersebut umumnya untuk dapat bekerja secara informal. Sedangkan pada tahun akhir capaian indikator ini meningkat disebabkan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan lebih banyak agar dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan-perusahaan besar yang mulai meluas di Kabupaten Luwu.
- c) Tingkat produktivitas mengalami fluktuasi yang cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya inflasi atau meningkatnya harga komoditi beberapa lapangan usaha. Kondisi ini juga sejalan dengan meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang tidak dipengaruhi inflasi (PDRB berdasarkan harga konstan).
- d) Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten memiliki dinamika yang berubah-ubah disebabkan kondisi lapangan usaha formal sebagian masih dalam tahap awal membuka lapangan usaha sehingga rekrutmen tenaga kerja masih minim. Selain itu, masih kurangnya kesadaran pihak penyedia kerja untuk melaporkan setiap penempatan kerja yang terpenuhi.
- e) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) relatif relatif mengalami peningkatan yang dinamis. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesadaran perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja sesuai ketentuan yang berlaku mulai terbuka.

c. *Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs)*

Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan SDGs Tahun 2023

No	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		%
			Target	Capaian	
1	Persentase tenaga kerja formal	29,17	27,12	35,09	129,39
2	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	n.a	97,21	n.a	n.a
3	Upah rata-rata per jam pekerja	17,406	16.501	18.752	113,64
4	Tingkat setengah pengangguran	70,83	74,48	7,01	9,41
5	Persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	14,92	10,28	10,08	98,05
6	Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur	14,92	9,12	4,29	47,04
7	Proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan	71,93	80,55	56,10	69,65

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Persentase tenaga kerja formal pada tahun 2023 adalah 35,09%, meningkat dari tahun sebelumnya. Tenaga kerja formal tersebut adalah pegawai negeri, karyawan/buruh perusahaan dan pekerja lainnya yang mendapatkan upah.
2. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian pada tahun 2023 ini tidak dapat diukur disebabkan adanya perubahan komposisi data sektoral yang tidak lagi mengakomodir data pekerja informal yang ada. Meskipun demikian sektor pertanian informal masih menjadi lapangan

kerja/usaha utama masyarakat mengingat kepemilikan lahan oleh masyarakat sendiri.

3. Upah rata-rata per jam pekerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan UMP yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
4. Tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan hingga 7,01% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bertambahnya orang yang bekerja secara normal sesuai standar jam kerja umumnya (rata-rata 40 jam per minggu). Pencapaian sebelumnya memiliki nilai yang sangat tinggi disebabkan adanya kesalahan penetapan target dan pengukuran.
5. Persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Luwu. Angka net ini diukur dari jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun (termasuk dalam Angkatan kerja usia muda).
6. Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 4,29% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan sektor manufaktur perlahan mengalami penurunan dan bergeser pada sektor lainnya seperti Konstruksi dan perdagangan yang meningkat pesat di wilayah Kabupaten Luwu.
7. Proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan menurun drastis 4,58% dari tahun sebelumnya dengan nilai 56,10%. Hal ini menunjukkan masih terdapat sebagian pekerja/buruh belum terakomodir dalam jaminan perlindungan kerja terutama pada perusahaan baru beroperasi di tahun 2023.

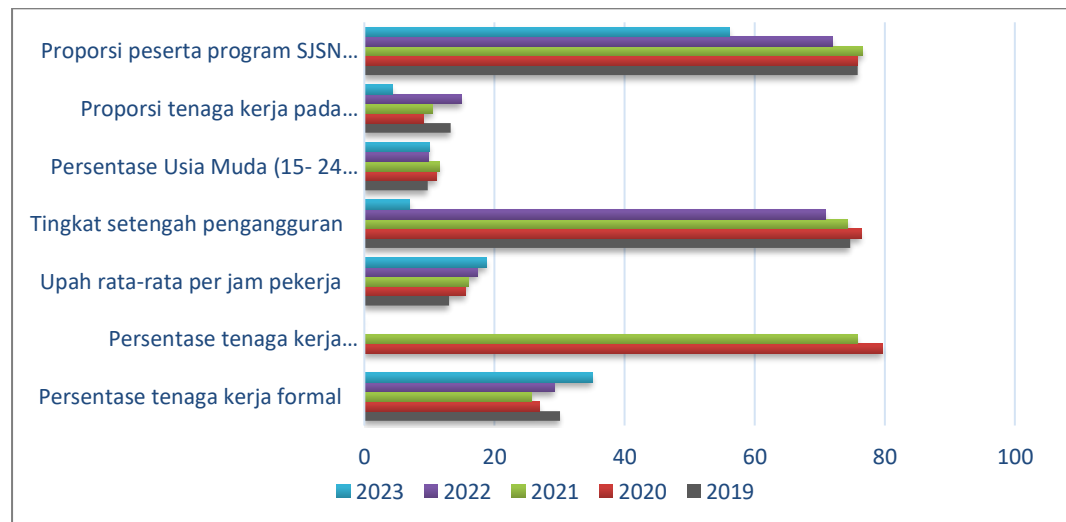
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun sebelumnya, maka perkembangan capaian kinerja berdasarkan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perkembangan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator SDGs
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tenaga kerja formal	30,07	26,96	25,65	29,17	35,09
2	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	n.a	79,62	75,85	n.a	n.a

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
3	Upah rata-rata per jam pekerja	13.020	15.606	16.025	17.406	18.752
4	Tingkat setengah pengangguran	74,70	76,37	74,35	70,83	7,01
5	Persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	9,71	11,16	11,57	9,92	10,08
6	Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur	13,31	9,12	10,50	14,92	4,29
7	Proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan	75,85	75,79	76,51	71,93	56,10

Gambar 3.3
Grafik Capaian Kinerja berdasarkan Indikator SDGs Tahun 2019 - 2023



Dari perbandingan tahun 2019 hingga 2023 tergambar bahwa capaian kinerja berdasarkan indikator SDGs cukup fluktuatif kecuali indikator upah rata-rata per jam kerja dan persentase tenaga kerja formal yang terus mengalami peningkatan. Pada sektor pertanian informal, tidak terdapat penyajian datanya 2 tahun terakhir namun sektor ini masih menjadi peluang alternatif tenaga kerja agar tetap bisa mendapatkan penghasilan. Dilain hal, indikator setengah pengangguran, persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) mengalami penurunan diikuti proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur dan proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan yang juga menurun di tahun tersebut. Perubahan-perubahan yang relatif menurun tersebut disebabkan ketidakstabilan sosial ekonomi yang

menyebabkan adanya inflasi dan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Luwu.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Hasil Pengukuran kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang sangat baik meskipun masih terdapat 1 (satu) indikator yang masih dalam proses penilaian/pengukuran. Jika dievaluasi dan dianalisis hasil capaian kinerja tersebut, maka terdapat beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkembangan investasi pada wilayah tertentu (Kecamatan Bua dan Latimojong) mendorong kesempatan kerja yang bergeser pada sektor konstruksi dan manufaktur yang bersifat formal.
2. Penempatan kerja belum terakumulasi dengan baik mengakibatkan akurasi persentase tenaga kerja yang bekerja secara formal masih rendah.
3. Kualitas sumber daya aparatur yang melaksanakan kegiatan belum disesuaikan dengan tupoksi dan kompetensinya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan mengingat perubahan kebijakan dan mekanisme pengelolaan anggaran terus mengalami perubahan.
4. Pemanfaatan Informasi teknologi dalam pengelolaan informasi kerja dan ketenagakerjaan belum terintegrasi dengan baik pada masyarakat dan pihak terkait.

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 90,51% atau Rp.6.819.909.509,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.534.813.215,-. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah. Kinerja anggaran menjadi faktor penting berjalannya program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Jika ditinjau dari kinerja anggaran maka realisasi pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :



Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Dalam pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.5.211.357.297,- yang terealisasi sebesar Rp.5.099.568.344,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.920.170	5.570.500	94,09	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.361.770	3.297.500	98,09	1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Renja Perubahan
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	429.000	385.000	89,74	1 Dokumen RKA-PD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	429.000	385.000	89,74	1 Dokumen Perubahan RKA-PD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	468.000	427.000	91,24	1 Dokumen DPA-PD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	468.000	427.000	91,24	1 Dokumen Perubahan DPA-PD
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	764.400	649.000	84,9	1 Dokumen LKIP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.534.533.405	4.439.873.228	97,75	Penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah 100%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.445.733.405	4.351.073.228	97,87	Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah 55 orang selama 12 bulan
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	88.800.000	88.800.000	91,67	Honorarium pengelola keuangan sejumlah 10 orang dan Honorarium pengelola barang dan jasa 1 orang
3	Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	6.460.200	6.372.000	90,9	Administrasi Barang milik daerah



NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
					terselenggara 100%
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.460.200	6.372.000	90,9	Dokumen penatausahaan barang 2 Laporan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.844.250	326.588.301	96,29	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum 100%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.080.900	3.049.200	98,97	Komponen Listrik sebanyak 5 Jenis
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.500.000	100	Peralatan Kantor berupa mesin scanner sebanyak 1 unit
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.602.250	3.597.200	99,86	Logistik kantor sebanyak 7 jenis
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.370.000	9.352.500	99,81	Cetak dan Fotocopy sebanyak 7 Jenis
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000	6.400.000	93,75	Surat Kabar sebanyak 12 Jenis selama 12 bulan
4.6	Penyediaan Bahan/Material	31.231.100	31.092.975	96,36	ATK, Kertas, Bahan Komputer dan bahan lainnya sebanyak 5 Jenis selama 12 bulan
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.010.000	8.987.750	89,1	Makanan dan Minuman Tamu sebanyak 2 jenis selama 12 bulan
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.650.000	261.608.676	96,36	Koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah sebanyak 92 kali dalam 1 tahun
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.100.300	250.087.115	68,22	Jasa Penunjang Urusan 100%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000	24.000.000	91,67	Surat Dinas sebanyak 1 Dokumen selama 1 tahun dikelola oleh 2 orang arsiparis dan 2 orang Caraka
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.300	66.987.115	16,67	Biaya tagihan listrik dan internet selama 1 Tahun



NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.900.000	3.900.000	87,18	Jasa Perbaikan peralatan kantor sebanyak 2 Jenis
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.200.000	155.200.000	87,07	Jasa tenaga Administrasi 10 orang, operator komputer 7 orang, operator SIMDA 1 orang, Tenaga Kebersihan 2 orang, Penjaga Kantor 2 orang selama 12 bulan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.498.972	71.077.200	90,96	Barang Milik Daerah yang dipelihara 100%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.499.250	66.080.200	90,31	Biaya STNK untuk 15 unit, Suku Cadang dan Service serta BBM selama 12 bulan
6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.999.722	4.997.000	99,95	Biaya perbaikan/pemeliharaan kantor dengan luas 75 m2
TOTAL		5.211.357.297	5.099.568.344	96,06	

Pada tabel terlihat bahwa realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar 96,06%. Realisasi ini menghasilkan output berupa kegiatan rutin/operasional kantor yang menunjang tercapainya akuntabilitas kinerja perangkat daerah berkaitan dengan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan administrasi umum lainnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.50.194.400,- yang terealisasi sebesar Rp. 49.898.700,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan
Kesempatan Kerja

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	42.522.400	42.241.500	99,34	pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 11,36%
1.1	Pelayanan antar Kerja	27.386.100	27.243.500	99,48	Pelayanan antar kerja 1 jenis (pelayanan AK 1) selama 12 bulan
1.3	Perluasan Kesempatan Kerja	15.136.300	14.998.000	99,09	Tenaga Kerja Mandiri yang dibina sebanyak 1 Kelompok (20 orang)
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	7.672.000	7.657.200	99,81	PMI yang mendapat perlindungan sebesar 1%
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	7.672.000	7.657.200	99,81	PMI yang mendapat perlindungan berjumlah 3 orang
TOTAL		50.194.400	49.898.700	99,41	

Pada tabel terlihat bahwa program tersebut terealisasi 99,41% yang menunjukkan adanya optimalisasi anggaran untuk bidang ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa kegiatan lain terkait ketenagakerjaan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja bidang ketenagakerjaan, seperti Peningkatan sumber daya pelayanan melalui penerapan ISO untuk perbaikan kualitas pelayanan dan *Job Fair*.

Sasaran 3 : Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal

Pencapaian sasaran dan indikator ini juga didukung oleh 1 (satu) program yakni Program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar



Rp.505.219.577,- yang terealisasi sebesar Rp.504.426.880,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan
penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	22.631.820	22.435.910	96,81	100 perusahaan telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	22.631.820	22.435.910	96,81	1 Dokumen data/informasi perusahaan terkait hubungan industrial
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	482.587.757	481.990.970	482.587.757	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja mencapai 90%
2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	16.866.460	16.497.610	16.866.460	Sosialisasi pencegahan perselisihan HI sebanyak 1 kegiatan
2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	465.721.297	465.493.360	465.721.297	Jaminan sosial/BPJS Ketenagakerjaan Non ASN sebanyak 10.460 orang selama 12 bulan dan Pekerja Rentan sebanyak 1.984 orang selama 3 bulan
TOTAL		505.219.577	504.426.880	99,65	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Program Hubungan Industrial terealisasi optimal sebesar 99,65%. Output kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran ini menyajikan dokumen gambaran kuantitas dan kualitas perusahaan dalam hubungan dengan pekerja/buruh



dan jaminan ketenagakerjaan yang didapatkan. Pada program ini perusahaan dan usaha kecil menengah teridentifikasi dengan jelas kondisi tenaga kerja, kompetensi serta jaminan yang diberikan. Selain itu, terdapat peningkatan pemberian jaminan ketenagakerjaan bukan hanya untuk pegawai Non ASN dan Petugas Keagamaan tetapi pekerja rentan yang terindikasi miskin ekstrem pun telah mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Adanya gambaran tersebut menunjukkan adanya akomodasi yang besar untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan bidang ketenagakerjaan yang dapat mendorong menurunnya pengangguran.

Sasaran 4 : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung pula oleh 1 (satu) program yakni Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.1.732.747.833,- yang terealisasi sebesar Rp.1.130.815.784,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
 Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.717.078.033	1.115.574.385	51,51	Penyelenggaraan pelatihan 60%
1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	79.355.650	78.766.250	77,98	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan (<i>Fishery Industry</i>) diikuti oleh 16 orang peserta
1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.637.722.383	1.036.808.135	50,22	Pembangunan Gedung Workshop BLK sebanyak 1 Unit
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.669.800	15.241.400	92,48	Terbinanya 6 LPK (BLKK)
2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.669.800	15.241.400	92,48	Monev dan pembinaan 6 BLKK
TOTAL		1.732.747.833	1.130.815.785	51,88	

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di atas terealisasi sebesar 51,88%. Meskipun realisasi tidak optimal namun

beberapa sub kegiatan telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menopang pencapaian tujuan dan sasaran. Realisasi program ini cukup rendah disebabkan Pembangunan Workshop BLK pada sub kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota tidak rampung tepat waktu sehingga pendanaannya hanya disesuaikan dengan realisasinya.

Sasaran 5 : Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi

Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yakni Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 33.872.200,- yang terealisasi sebesar Rp. 32.751.614,- dengan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	35.294.108	35.199.800	89,82	1 kawasan transmigrasi yang dikembangkan
1.1	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	35.294.108	35.199.800	89,82	Pembangunan Talud Jalan di Desa Bukit Harapan Kec. Bua
TOTAL		35.294.108	35.199.800	89,82	

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi di atas terealisasi 89,82% dengan output berupa Pembangunan Talud Jalan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Secara terinci, rekapitulasi target dan realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut :



TABEL 3.12
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU

NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	5.211.357.297	5.099.568.344	96,06	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	100	5.920.170	5.570.500	94,09	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	2	2	3.361.770	3.297.500	98,09	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	429.000	385.000	89,74	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	429.000	385.000	89,74	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	468.000	427.000	91,24	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	468.000	427.000	91,24	100
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Dokumen	1	1	764.400	649.000	84,9	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	4.534.533.405	4.439.873.228	97,75	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	orang/ bulan	624	624	4.445.733.405	4.351.073.228	97,87	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	Dokumen	14	14	88.800.000	88.800.000	91,67	100
1.3	Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	persen	100	100	6.460.200	6.372.000	90,9	100
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	6.460.200	6.372.000	90,9	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100	100	326.844.250	326.588.301	96,29	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	8	8	3.080.900	3.049.200	98,97	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	1	1	2.500.000	2.500.000	100	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	7	7	3.602.250	3.597.200	99,86	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	4	4	9.370.000	9.352.500	99,81	100
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	jenis	5	7	6.400.000	6.400.000	93,75	140
1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	jenis	6	6	31.231.100	31.092.975	96,36	100
1.4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan jamuan makan dan minum yang disediakan	bulan	12	12	9.010.000	8.987.750	89,1	100
1.4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	kali	200	216	261.650.000	261.608.676	96,36	108
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi SKPD		12	12	326.844.250	326.588.301	96,29	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	persen	100	100	263.100.300	250.087.115	68,22	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	surat	120	120	24.000.000	24.000.000	91,67	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	bulan	12	12	72.000.300	66.987.115	16,67	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	2	2	3.900.000	3.900.000	87,18	100



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	orang/ bulan	264	264	163.200.000	155.200.000	87,07	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	persen	100	100	74.498.972	71.077.200	90,96	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	15	15	69.499.250	66.080.200	90,31	100
1.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	m2	15	15	4.999.722	4.997.000	99,95	100
2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan jenis pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan	persen	90	89	1.732.747.833	1.130.815.785	51,88	98,89
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	persen	60	60	1.717.078.033	1.115.574.385	51,51	100
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	orang	16	16	79.355.650	78.766.250	77,98	100
2.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelatihan kerja Kab/Kota yang diadakan	unit	1	1	1.637.722.383	1.036.808.135	50,22	100
2.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	LPK	4	6	15.669.800	15.241.400	92,48	150



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
2.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	LPK	4	6	15.669.800	15.241.400	92,48	150
34	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	6,06	1,47	50.194.400	49.898.700	99,41	77,72
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	pelayanan	1	1	42.522.400	42.241.500	99,34	100
3.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah bulan pelayanan antar kerja	bulan	50	58	27.386.100	27.243.500	99,48	116
3.1.3	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan	orang	100	100	15.136.300	14.998.000	99,09	100
3.2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	persen	40	100	7.672.000	7.657.200	99,81	100
3.2.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlindungan	orang	8	3	7.672.000	7.657.200	99,81	100
5	Hubungan Industrial	persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	persen	39,1	40,19	505.219.577	504.426.880	99,65	102,79
5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	100	86	22.631.820	22.435.910	96,81	86



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
5.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Dokumen	1	1	22.631.820	22.435.910	96,81	100
5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	persen	90	90	482.587.757	481.990.970	99,79	100
5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Kali	4	4	16.866.460	16.497.610	97,81	100
5.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	orang	9500	10500	465.721.297	465.493.360	99,86	110,53
6	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Ha	12	12	33.872.200	32.751.614	96,69	100,00
6.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	lokasi	1	1	33.872.200	32.751.614	96,69	100,00
6.1.1	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Jumlah Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan	Paket	1	1	33.872.200	32.751.614	96,69	100,00



NO	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kelembagaan yang disiapkan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						7.534.813.215	6.819.909.509	90,51	92,77

Dari uraian tersebut jelas bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal. Namunpun demikian, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja masih terdapat kesenjangan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya berkaitan dengan kekeliruan penetapan belanja, mekanisme pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran umumnya terealisasi dengan baik dengan rata-rata realisasi 92,77%.

Tabel 3.13
Pertumbuhan Anggaran dan Belanja tahun 2020-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian (%)
2020	5.595.110.026	5.546.697.245	99,13
2021	5.114.819.041	4.944.157.540	96,66
2022	6.147.254.050	6.021.856.578	97,96
2023	7.534.813.215	6.819.909.509	90,51
Rata-rata Pertumbuhan	11%	8%	

Pada 4 (empat) tahun terakhir terlihat bahwa penganggaran dan realisasi berfluktuasi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 11% pada anggaran dan 8% pada realisasinya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan kontribusi anggaran yang relatif meningkat sesuai kinerja yang direncanakan.



BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kabupaten Luwu terkait tenaga kerja dan transmigrasi. Hasil pengukuran kinerja ini akan menunjukkan pencapaian berupa peningkatan atau penurunan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu pada Tahun Anggaran 2023 merupakan kinerja pada periode Rencana Strategis Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai adalah acuan untuk memperbaiki target-target yang belum tercapai.

Hasil pengukuran dan penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2023 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah Daerah masih dalam proses pengukuran kinerja dengan realisasi keuangan sebesar 96,06%. Hal ini menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam mengoptimalkan pendanaan perangkat daerah. Namunpun demikian, kinerja perlu lebih dioptimalkan lagi agar pencapaiannya lebih besar dari anggaran yang digunakan.
2. Pencapaian sasaran meningkatnya kesempatan kerja mencapai kinerja sebesar 72,53% dengan realisasi keuangan sebesar 99,41%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pencapaian ini perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya dengan penambahan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kinerja secara makro di wilayah kabupaten Luwu
3. Pencapaian sasaran meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja di Sektor Formal dan Informal mencapai kinerja 50,46% dengan realisasi keuangan sebesar 99,65%. Pencapaian ini menurun dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dengan mengoptimalkan kegiatan yang mendukung kinerja terkait.
4. Pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja mencapai kinerja 22,92% dengan realisasi keuangan sebesar 51,88%. Pencapaian kinerja ini menurun dari tahun sebelumnya sehingga perlu



dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran tersebut.

5. Pencapaian sasaran meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi mencapai kinerja sebesar 100% dengan realisasi keuangan 89,82%. Pencapaian ini telah cukup baik namun masih memerlukan pengembangan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dari uraian pencapaian 5 (lima) sasaran tersebut menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Walaupun begitu, beberapa kendala dan faktor penghambat seperti; penetapan belanja, sumber daya manusia, perubahan kebijakan anggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan. perlu dapat diantisipasi agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai.

Pencapaian kinerja dan beberapa kendala yang mempengaruhinya memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Berikut beberapa masukan dan saran:

- 1, Evaluasi berkala secara internal perlu dilakukan terhadap program/kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
- 2, Program/kegiatan inovatif diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu.
- 3, Indikator sasaran maupun program/kegiatan perlu dirasionalisasi agar sinergi dengan tujuan dan tupoksi setiap bidang dalam organisasi perangkat daerah.
- 4, Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kami susun, sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan sebagai penyempurnaan kebijakan di tahun mendatang.

Belopa, 26 Februari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199703 1 034